

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi UN Women dalam merespons hambatan ekonomi perempuan di pesisir Bangladesh dijalankan melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi yang bersifat adaptif dan inklusif. UN Women mengatasi keterbatasan akses ekonomi dengan menyediakan teknologi energi terbarukan sebagai instrumen produksi yang langsung menysasar hambatan material perempuan. Strategi ini dikomunikasikan melalui framing resiliensi iklim dan kesejahteraan keluarga guna meminimalisir resistensi sosiokultural. UN Women tidak hanya menysasar perempuan, tetapi juga melibatkan aktor laki - laki termasuk tokoh masyarakat dan instansi pemerintah sebagai mitra strategis untuk melegitimasi peran ekonomi perempuan di ruang publik. Pemanfaatan teknologi ini berfungsi sebagai instrumen diplomasi norma yang mampu membuka akses perempuan ke unit-unit ekonomi tanpa memicu benturan frontal dengan nilai tradisional yang konservatif.

Analisis menggunakan *perspektif Gender and Development (GAD)* menunjukkan bahwa meskipun strategi UN Women mampu memenuhi *practical gender needs*, difusi norma kesetaraan mengalami stagnasi pada tahap internalisasi. Secara administratif, program ini mencatatkan peningkatan partisipasi perempuan, namun secara struktural norma tersebut belum

bertransformasi menjadi perilaku yang dianggap *taken for granted* dalam relasi kuasa domestik. Hal ini dibuktikan oleh data empiris yang menunjukkan skor pemberdayaan perempuan (*Three Domains of Empowerment*) hanya sebesar 0,57 dengan hanya 14% perempuan yang dikategorikan berdaya secara substantif (Rahman et al., 2024). Data ini mengonfirmasi bahwa *strategic gender interests* terutama dalam hal otoritas pengambilan keputusan dan kontrol mandiri atas aset produktif dan belum tercapai secara merata.

Secara keseluruhan, dampak strategi UN Women terhadap posisi tawar perempuan di pesisir Bangladesh masih berada pada tahap transisi yang rentan. Pergeseran relasi kuasa belum mencapai tingkat transformasi strategis yang mampu membongkar struktur patriarki secara permanen. Rendahnya kontrol perempuan atas pendapatan (35-40%) di wilayah pesisir mencerminkan agensi ekonomi masih dibatasi patriarki domestik, meskipun ada kemajuan akses energi melalui EmPower (UN Women, 2024; Rahman et al., 2024). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program EmPower Fase 1 mampu mendorong inklusi ekonomi perempuan sebagai instrumen resiliensi keluarga, namun masih menyisakan tantangan besar dalam mewujudkan redistribusi kekuasaan yang nyata. Internalisasi norma kesetaraan yang utuh di tingkat akar rumput tetap terhambat oleh kuatnya agensi laki-laki sebagai pemegang otoritas terakhir dalam struktur domestik masyarakat pesisir.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, program pemberdayaan perempuan di masa mendatang disarankan untuk bergeser dari sekadar penyediaan akses ekonomi menuju intervensi yang lebih transformatif terhadap struktur relasi dalam rumah tangga. Pelibatan aktor laki-laki secara lebih intensif dalam edukasi mengenai pembagian beban domestik menjadi langkah yang sangat mendesak, mengingat fenomena *double burden* masih dialami oleh 75% perempuan di wilayah intervensi. Di samping itu, penguatan literasi teknis yang bersifat mandiri bagi perempuan perlu diprioritaskan agar mereka tidak lagi bergantung pada otoritas informasi laki-laki dalam mengoperasikan teknologi hijau dan mengelola unit usaha berbasis energi terbarukan.

Dari sisi keilmuan, studi Hubungan Internasional mengenai difusi norma perlu memperluas lokus analisisnya melampaui kebijakan di tingkat makro negara, dengan turut memperhatikan dinamika di ruang domestik sebagai indikator nyata dalam proses internalisasi norma global. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana pemanfaatan teknologi dapat menjadi pendorong perubahan identitas gender yang bersifat permanen di wilayah-wilayah lain yang rentan terhadap bencana. Hal ini penting untuk menguji apakah pendekatan efisiensi pembangunan benar-benar mampu bertransformasi menjadi kesetaraan hak yang fundamental, ataukah hanya menghasilkan solusi transaksional yang bersifat jangka pendek.